

Koalisi Sipil Tolak Usulan Soeharto

Dari Halaman 1

resmi dari Dirjen Pemberdayaan Sosial, khususnya mengenai surat yang kami ajukan baik melalui e-mail maupun tertulis," ujar Jane Rosalina selaku perwakilan dari koalisi, dilansir dari CNNIndonesia, Selasa (22/4).
Jane menuturkannya, koalisi mengirimkan surat terbuka baik melalui e-mail maupun secara langsung pada 24 Maret dan 10 April 2025-tepat satu hari sebelum batas usulan akhir penerima gelar pahlawan.
Surat tersebut sudah diserahkan dan diterima langsung oleh bagian persuratan.
"Harapannya Kemensos tidak lagi mengusulkan gelar pahlawan untuk Soeharto yang kemudian akan dibahas oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan termasuk hingga disahkan oleh Presiden," ungkap Jane.
Ia mengungkapkan, penolakan itu berdasarkan alasan yang logis dan patut, yakni rekam jejak buruk dan berdarah Soeharto selama 32 tahun menjabat sebagai Presiden RI.
Soeharto, terang koalisi, telah melakukan

kekerasan terhadap warga sipil, pelanggaran HAM bahkan pelanggaran berat terhadap HAM, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, serta praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Usulan Gelar Pahlawan Nasional
Dilansir dari laman Kementerian Sosial, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) membahas nama-nama yang akan diusulkan untuk diberi gelar Pahlawan Nasional. Nama Soeharto termasuk di dalamnya.
Pengusulan tersebut dibatasi sampai 11 April 2025. Setelah tahap verifikasi, sidang pleno TP2GP akan menyampaikan rekomendasi usulan calon Pahlawan Nasional dari Menteri Sosial kepada Presiden. Selanjutnya, Presiden memilih daftar nama yang diajukan untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.
Menurut koalisi, pengusulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bermasalah karena berupaya menghapus sejarah dan pemutihan atas berbagai kejahatan yang dilakukan.
Terlebih, pasca-reformasi, negara pun telah mengakui rekam jejak berdarah dan buruk dari Soeharto berupa pelanggaran berat HAM,

pelanggaran HAM, serta praktik KKN yang dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 dan TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
"Patut dipertimbangkan bahwa upaya dalam mendorong perbaikan situasi dan kehidupan bernegara pasca-rezim otoritarian orde baru sudah sepatutnya menjadi dasar dalam menyelenggarakan urusan negara dalam semangat anti-KKN, mengedepankan penguatan demokrasi dan rule of law, serta berpijak pada nilai HAM dan suri tauladan yang kesatria serta tidak memberikan toleransi kepada individu yang merugikan Negara Republik Indonesia," ungkap KontraS, organisasi yang tergabung dalam Koalisi GEMAS.
"Hal ini penting demi hak dan harkat martabat keluarga korban pelanggaran berat HAM dan pelanggaran HAM yang menanti keadilan, serta masa depan generasi muda yang tidak menormalisasi kekerasan," tambahnya.(cnni/js)

Mahfud: KKN

Dari Halaman 1

besar dari Orba. Jaringan dari atas ke bawah, dari tengah ke samping, besarnya luar biasa," kata Mahfud di acara 'Indonesia Integrity Forum' di Jakarta, Kamis (10/10).
Mahfud mengatakan praktik KKN di zaman Orde Baru dikoordinir oleh Soeharto untuk dibagi-bagikan ke krunya. Namun, saat ini KKN terjadi di semua lini dengan mengatasnamakan demokrasi.(cnni/js)

Israel Serang

Dari Halaman 1

pria di dalam kendaraan yang dihantam serangan tersebut. Otoritas Pertahanan Sipil Lebanon tidak menyebut identitas pria yang tewas itu.
Namun seorang pejabat keamanan Lebanon, yang enggan disebut namanya, mengungkapkan bahwa serangan drone Israel itu menewaskan Hussein Atoui, yang merupakan pemimpin sayap bersenjata dari kelompok al-Jamaa al-Islamiya, yang disebut Pasukan al-Fajr.(det/js)



Hidayah Soeharto Pahlawan Nasional?

Dari Halaman 1

politik pasca-G30S/PKI, mencatat pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, serta mencapai swasembada pangan pada era 1980-an. Ia membangun infrastruktur nasional, membuka akses pendidikan dan kesehatan ke pelosok, serta memperkuat militer sebagai garda terdepan pertahanan negara. Dalam konteks pembangunan fisik dan stabilitas jangka panjang, jasanya tak bisa diabaikan begitu saja.
Namun sejarah tidak berjalan dalam satu warna. Rezim Orde Baru juga dikenal dengan represi terhadap kebebasan sipil, pelanggaran hak asasi manusia, serta korupsi yang merajalela. Transparency International menyebut Soeharto sebagai salah satu pemimpin paling korup di dunia, dengan dugaan penggelapan dana negara dalam jumlah sangat besar. Tragedi kemanusiaan seperti 1965-66, Tanjung Priok, Talangari, hingga kekerasan di Timor Timur menjadi noda yang belum terhapus.
Di simlah letak dilemanya: bisakah seseorang yang jasanya besar namun memiliki cacat sejarah yang dalam tetap diangkat sebagai pahlawan nasional? Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan menyebutkan bahwa gelar pahlawan diberikan kepada seseorang yang berjasa luar biasa serta tidak pernah melakukan tindakan tercela.
Pahlawan nasional bukan sekadar penghargaan administratif. Ia adalah simbol nilai-nilai yang kita junjung bersama sebagai bangsa: kejujuran, keberanian, integritas, dan kemanusiaan. Maka, sebelum gelar itu diberikan, bangsa ini perlu menimbang dengan jernih, bukan sekadar karena tekanan politik atau romantisme pembangunan masa lalu.
Bukan berarti Soeharto harus dihapus dari sejarah. Justru sebaliknya—ia harus tetap dikenang, dipelajari, dan dibicarakan secara utuh, jujur, dan kritis. Tetapi mengangkatnya sebagai pahlawan nasional berarti memberi stempel pengesahan moral atas seluruh warisan politiknya, termasuk luka yang belum sembuh.
Sejarah adalah milik generasi mendatang. Maka keputusan besar seperti ini tak boleh gegabah. Ia menuntut kedewasaan dalam membaca masa lalu dan keberanian untuk bersikap adil—bukan hanya bagi yang berjasa, tapi juga bagi mereka yang menjadi korban.
Pembangunan merupakan kata kunci utama dalam narasi Orde Baru. Di bawah Soeharto, Indonesia mengalami transformasi infrastruktur: jalan tol pertama dibangun, irigasi pertanian diperluas, dan proyek-proyek megacurser dijalankan. Pemerintahannya berhasil mengurangi angka kemiskinan secara signifikan dan menjadikan Indonesia negara yang sempat dijuluki Macan Asia Tenggara.
Namun keberhasilan ini tidak lepas dari kontrol ketat terhadap informasi dan media. Semua berita diarahkan untuk memperkuat citra negara stabil dan pemimpin bijaksana. Pendidikan Pancasila, film G30S/PKI, dan media massa dikooptasi untuk membentuk persepsi tunggal tentang sejarah dan kepemimpinan.
Propaganda memainkan peran sentral dalam penciptaan legitimasi politik. Kritik disamakan dengan makar, oposisi dianggap pengganggu pembangunan. Maka, prestasi yang tampak kadang datang dengan harga mahal: hilangnya ruang kritik, penyeragaman budaya, dan matinya demokrasi.
Tragedi 1965 menjadi titik awal kekuasaan Soeharto. Dalam waktu singkat, kekuasaan berpindah dari Soekarno ke Soeharto, disertai dengan pembantaian terhadap jutaan orang yang dituduh terlibat PKI. Hingga kini, belum ada pengakuan resmi dari negara atas tragedi tersebut, apalagi keadilan bagi para korban.
Rezim Orde Baru membangun narasi lain di luar versi resminya. Buku, film, diskusi, dan bahkan percakapan keluarga pun dikendalikan. Korban distigma, keturunannya dibatasi hak-haknya, dan ingatan publik dipaksa menerima satu versi sejarah.
Tragedi 1965 bukan hanya luka, tapi juga cermin kekuasaan absolut yang menindas dengan nama stabilitas. Dalam konteks ini, menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional tanpa mengakui luka tersebut merupakan pengkhianatan terhadap sejarah dan rasa keadilan.
Selama masa pemerintahannya, Soeharto mengonsolidasikan kekuasaan ekonomi melalui penguasaan bisnis oleh keluarga dan kroni-kroninya. Perusahaan milik anak-anak Soeharto merambah hampir semua sektor strategis: dari logistik, konstruksi, hingga media.
Sistem kroni ini dikenal sebagai "KKN": Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Banyak proyek negara dikendalikan melalui kedekatan, bukan kompetensi. Hal ini menciptakan distorsi besar dalam struktur ekonomi nasional dan memperkuat ketimpangan sosial.
Laporan Transparency International pada awal 2000-an menempatkan Soeharto sebagai pemimpin paling korup sepanjang sejarah modern. Uang negara yang diduga digelapkan mencapai puluhan miliar dolar. Sayangnya, hingga kini banyak kasus belum tuntas diselesaikan secara hukum.
Ironisnya, di tengah maraknya literasi digital, sebagian masyarakat justru mulai meromantisasi masa Orde Baru. Ungkapan seperti "anak zaman Soeharto" menjadi populer, terutama di tengah krisis ekonomi dan ketidakpastian politik masa kini.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa memori kolektif kita masih rentan dimanipulasi. Ketika pendidikan sejarah kritis minim, dan dokumentasi korban tidak ditampilkan secara adil, maka politik lupa menjadi alat efektif untuk mengaburkan fakta.
Menghadapi nostalgia Orde Baru, penting untuk menghadirkan narasi tandingan yang adil, terbuka, dan berdasarkan fakta. Agar generasi muda tidak terjebak dalam glorifikasi yang menyesatkan.
Gelar pahlawan nasional sekadar simbol, tapi bentuk pengakuan negara atas integritas moral dan pengabdian seseorang. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2009, seorang tokoh yang diajukan tidak boleh memiliki catatan hitam seperti pelanggaran HAM atau tindakan tercela.
Sejumlah tokoh besar lain juga pernah diajukan namun ditolak karena catatan kontroversial. Ini menunjukkan bahwa negara memiliki standar moral tertentu dalam memberikan gelar tersebut. Pertanyaannya: apakah Soeharto memenuhi standar itu, atau justru bertentangan dengannya?
Proses seleksi harus melibatkan kajian akademis, pertimbangan korban, serta diskusi publik. Keputusan seperti ini tak boleh didasarkan semata pada nostalgia, tapi pada keadilan sejarah.
Soeharto adalah bagian dari sejarah Indonesia yang tak bisa dihapus. Ia pernah memimpin negeri ini, membawa stabilitas dan pembangunan, tapi juga meninggalkan luka dan ketimpangan yang masih kita rasakan hingga kini.
Menyikapi warisan Soeharto bukan dengan melupakan, apalagi mengulungkannya, tetapi dengan mengingat secara utuh. Sejarah harus dibaca dengan kejujuran, bukan dengan sikap romantik atau dendam.
Gelar pahlawan adalah urusan nilai. Ia lebih dari sekadar jasa, tapi juga soal keberanian moral untuk mengatakan yang benar, bahkan kepada mereka yang pernah berjasa. Maka, biarlah Soeharto dikenang, dipelajari, dikritisi—namun jangan buru-buru diberi mahkota kepahlawanan sebelum kita sepakat tentang kebenaran sejarah itu sendiri.

Golkar Buka Suara

Dari Halaman 1

nasional. Ia mengklaim tidak tahu terkait penolakan warga sipil tersebut.
"Saya kira, Kalau ada penolakan saya belum mendapatkan menerima (informasi)," kata Hetifah di

Hotel Pullman, Jakarta, Senin (21/4) malam.
Di sisi lain, Hetifah menjelaskan usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional dilayangkan oleh MPR Fraksi Golkar setelah melakukan pembahasan internal.
Salah satunya, usulan itu turut dibahas bersama

Satkar Ulama Indonesia yang merupakan organisasi sayap Partai Golkar.
"Ya tentu kita menghargai usulan tersebut dan kami sebagai ya tentu saja bagian dari Golkar akan men-support apapun hal yang positif untuk kepentingan bangsa," ujar dia.(cnni/js)

Mensos Janji Dengarkan Aspirasi

Dari Halaman 1

nasional. Dia siap menampung semua aspirasi dari berbagai pihak.
"Ya tentu kami semua dengar ya. Ini bagian dari proses. Semua kami dengar, kami ikuti," ujar Gus Ipul setelah menghadiri halalbihalal Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Ahad (20/4/2025) malam WIB.
Dia menekankan bahwa semua usulan dari masyarakat akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

"Normatifnya juga kami lalui. Kalau kemudian ada kritik, ada saran, tentu kami dengarkan," kata Gus Ipul.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih di Jakarta, Selasa (18/3/2025), mengungkapkan, sudah ada 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025. Sebanyak empat di antara 10 nama itu, sebagai usulan baru. Sedangkan enam lainnya pengajuan kembali dari tahun-tahun sebelumnya.
"Untuk tahun 2025 sampai dengan saat ini, memang sudah ada proposal yang masuk ke kami, itu ada sepuluh. Empat pengusulan baru, dan enam ada-

lah pengusulan kembali di tahun-tahun sebelumnya," kata Mira.
Beberapa tokoh yang kembali diusulkan, antara lain Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Soeharto (Jawa Tengah), Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).
Sebanyak empat nama baru yang diusulkan tahun ini, yaitu Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Midian Sirait (Sumatera Utara), dan Yusuf Hasim (Jawa Timur). (rep/js)

Gelar Pahlawan dalam Proses

Dari Halaman 1

isyaratkan persetujuan dengan mengangapnya wajar. Paling tidak, itulah yang dilukiskan Mensesneg Prasetyo Hadi sebagai juribicara presiden, saat menilai tidak ada yang salah dengan wacana menjadikan HM Soeharto yang wafat pada Ahad 27 Januari 2008 dalam usia 87 tahun, sebagai pahlawan nasional.
Prasetyo menganggap wajar, apabila sebagai mantan kepala negara mendapat gelar tersebut.
Kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta --dikutip dari laman mediaindonesia Selasa 22/4-- "Saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga?
Menurut kami, mantan-mantan presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita."
LIHAT PRESTASI
Pras meminta masyarakat tidak hanya melihat

Soeharto dari kekurangannya, melainkan dari prestasi dalam membangun Indonesia.
"Jangan selalu melihat yang kurangnya, kita lihat prestasinya. Sebagaimana bapak presiden selalu menyampaikan bahwa kita itu bisa sampai di sini karena prestasi para pendahulu-pendahulu kita," terangnya.
Terkait adanya polemik dugaan kasus korupsi yang menyeret Soeharto, Pras --sapaanya-- menilai tergantung sudut pandang masing-masing individu.
Namun, ia yakin gelar ini akan diberikan untuk menghargai pemimpin-pemimpin terdahulu.
"Semangatnya pun bapak presiden bukan di situ. Semangatnya kita itu adalah kita itu harus terus menghargai, menghargai, memberikan penghormatan apalagi kepada para presiden kita," tuturnya.
USULAN BERJENJANG
Menteri Sosial Saifullah Yusuf masih mengkaji usulan pemberian gelar pahlawan kepada

Presiden ke-2 RI Soeharto.
Dia juga sudah mendengar adanya masukan soal rencana pemberian gelar kepada Soeharto.
"Usulan dari masyarakat juga kita ikuti, normatifnya juga kita lalui. Kalau kemudian ada kritik, ada saran, tentu kami dengarkan," kata dia usai menghadiri Halal Bihalal PKB di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada Minggu 20/4.
Gus Ipul mengatakan, secara prosedur, usulan gelar pahlawan harus dilakukan secara berjenjang mulai dari masyarakat hingga tingkat gubernur.
Proses ini juga masih terus dipantau oleh Kemensos.
"Nanti kita sedang proses tentu awalnya adalah masukan dari gubernur. Gubernur mendapatkan masukan dari bupati, walikota, yang sebelumnya bupati dan walikota itu adalah masukan dari masyarakat lewat seminar dan lain sebagainya," ujar dia. (mi/ep)

Muhammadiyah Dukung Evakuasi Warga

Dari Halaman 1

1.000 orang itu bersifat sementara untuk dilayani kesehatan dan keselamatannya, bahkan ada yang bisa disekolahkan untuk kemudian nanti pada saatnya dikembalikan ke tanah airnya, Palestina," ucapnya.
Meski demikian, dia mengingatkan bahwa pendekatan diplomatik dan politik jangka panjang tetap harus menjadi prioritas.
"Selama ini kan Indonesia itu sangat tegas terhadap (masalah) Palestina. Bahkan pidato Menteri Luar Negeri RI yang lalu, Bu Retno Marsudi begitu tegas, yang itu mewakili pemerintah Indonesia, biarpun sekarang berganti (menu), sikap politik itu tetap harus dipegang menjadi patokan utama," ujarnya.
Menurut Haedar, Muhammadiyah sejak lama telah aktif membantu rakyat Palestina melalui berbagai bentuk bantuan kemanusiaan, seperti pengiriman dokter ke Gaza, penyediaan pendidikan bagi mahasiswa Palestina di Indonesia, serta pembangunan madrasah bagi anak-

anak pengungsi di Beirut.
"Langkah-langkah yang bisa memecahkan masalah yang bersifat fast program itu juga tidak ada salahnya," katanya.
Menurut Haedar, menjaga kesatuan sikap di antara kelompok-kelompok pendukung kemerdekaan Palestina amat penting dengan menyikapi setiap perbedaan pandangan melalui dialog.
"Kita jangan saling kontradiksi yang akhirnya kita tidak bisa memobilisasi energi positif kita untuk Palestina. Saya yakin inilah tradisi dalam kehidupan kebangsaan kita," tutur Haedar.
Muhammadiyah, menurutnya, selalu siap bekerja sama dengan pemerintah dan semua elemen masyarakat dalam upaya mendukung rakyat Palestina.
Namun, ia berharap berbagai upaya tersebut benar-benar dijalankan dengan prinsip kemanusiaan dan berlandaskan semangat politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
"Langkah-langkah politik tentu juga harus menjadi perhatian pemerintah dengan semangat politik bebas

aktif dan proaktif untuk mencari solusi," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melawat ke lima negara di Timur Tengah yaitu Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania, untuk meminta dukungan mereka terhadap rencana Indonesia mengevakuasi 1.000 warga Palestina di Gaza ke Indonesia.
Presiden Prabowo menegaskan Indonesia akan menjalankan rencananya itu manakala mendapatkan "lampu hijau" dari seluruh pihak, termasuk negara-negara yang saat ini aktif membantu rakyat Palestina di Gaza.
"Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali, dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka berasal. Saya kira itu sikap Pemerintah Indonesia. Untuk itu, saya harus konsultasi kepada pemimpin daerah tersebut," kata Presiden Prabowo saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum berangkat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Rabu (9/4) dini hari. (cnni/js)

Puting Beliung Hantam Tapanuli Utara

Dari Halaman 1

deras juga menyebabkan terjadinya tanah longsor. Sehingga akses jalan di wilayah itu terputus. Saat ini petugas tengah berupaya mel-

akukan pembersihan material longsor dengan menurunkan alat berat.
"Atas peristiwa itu tidak ada korban jiwa. Namun jumlah rumah yang mengalami kerusakan untuk sementara data yang dihimpun

petugas kepolisian semua 20 unit rumah. Saat ini petugas kepolisian masih di lapangan untuk mencari apakah masih ada kerusakan yang lain akibat angin puting beliung tersebut," paparnya. (cnni/js)

Penempatan Jauh dan Gaji Kecil

Dari Halaman 1

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kedua, 575 CPNS Kementerian Kesehatan. Ketiga, 154 orang dari instansi Kementerian Komunikasi.
Keempat, ada 131 pelamar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang memutuskan mundur. Lalu, yang kelima ada sebanyak 121 orang mundur dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Sedangkan dalam mundurnya CPNS tersebut terbagi ke dalam 12 poin. Paling banyak adalah 1.285 orang memilih mundur karena unit penempatannya jauh dari domisili.
"Memang benar, bagian terbesar bahwa karena jaraknya jauh. Kebijakan optimalisasi adalah pada satu instansi, karena Kemendikti Saintek itu kampusnya banyak dan tersebar di seluruh Indonesia, maka kendala terbesar adalah jauh dari domisili. Tapi sebenarnya bisa diterima dulu, lima tahun kemudian pindah, itu bisa diatur oleh kementeriannya," jelasnya.
"Kemudian, tidak ada izin keluarga, karena

kesehatan orang tua, dianggap mengundurkan diri karena usulan instansi, kemudian sedang S2 atau S3 di tempat lain. Kemudian, terkendala kondisi kesehatan, merasa salah memilih formasi, dan yang terakhir merasa penghasilannya kalau nanti jadi PNS itu sedikit," tandasnya.
Zudan menegaskan, kebijakan optimalisasi CPNS dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini berhasil menyerap 16.167 orang. Jika tidak, belasan ribu formasi tersebut bakal kosong dan menimbulkan pemborosan biaya.
Di lain sisi, Zudan menegaskan pemerintah tidak menjatuhkan sanksi bagi CPNS yang mundur karena optimalisasi tersebut. Ia menyebut ini adalah pilihan pelamar.
"Kalau untuk yang optimalisasi, bagi yang mengundurkan diri tidak ada sanksi apa-apa. Karena ini sifatnya pilihan, kalau mau diambil ya silakan, tidak diambil juga tidak apa-apa. Ini adalah niat baik dari negara agar tidak ada kekosongan formasi," tegas Zudan selepas acara.
Berikut 12 alasan CPNS 2024 mundur:

1. Penempatan terlalu jauh dari domisili (1.285 orang)
 2. Terkendala izin keluarga (320 orang)
 3. Terkendala kondisi kesehatan orang tua (156 orang)
 4. Dianggap mengundurkan diri oleh usulan instansi (92 orang)
 5. Sedang/akan melanjutkan pendidikan (44 orang)
 6. Terkendala kondisi kesehatan pribadi (21 orang)
 7. Terikat kontrak dengan institusi/penyedia kerja lain (13 orang)
 8. Salah memilih formasi unit penempatan (11 orang)
 9. Terkendala kondisi kesehatan pasangan (8 orang)
 10. Tidak dapat memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan sampai batas waktu (8 orang)
 11. Merasa tidak berhak atas kelulusan (6 orang)
 12. Penghasilan tidak sesuai ekspektasi (3 orang)
- (cnni/js)